



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : SUHARYANTO  
NIK : 1801080110650002  
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Kerja : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I  
Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Jenis Laporan : Khusus - Akhir Menjabat  
Tanggal Kirim : 2 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : YUNARI SIGIT PRAMONO  
NIK : 3216062601730006  
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Kerja : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I  
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN  
Jenis Laporan : Periodik - 2024  
Tanggal Kirim : 15 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : MOCH FAREZ DWI SENTANU  
NIK : 3271012504740010  
Lembaga : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Unit Kerja : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU  
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Sub Unit Kerja : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I  
Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH  
MEMBAYAR  
Jenis Laporan : Periodik - 2024  
Tanggal Kirim : 20 Januari 2025

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Yth. Sdr **YUNARI SIGIT PRAMONO**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Di Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa LHKPN yang Bapak/Ibu kirimkan telah kami terima dengan ringkasan sebagai berikut :



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi  
Jakarta 12950

**LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

<b>Atas Nama</b>	: YUNARI SIGIT PRAMONO
<b>Jabatan</b>	: BENDAHARA PENGELUARAN - BALAI BESAR KARANTINA IKAN, : PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN JAKARTA I - : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Bidang</b>	: EKSEKUTIF
<b>Lembaga</b>	: KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Tanggal / Tahun Pelaporan</b>	: 2024

Email konfirmasi Lembar Penyerahan LHKPN ini bukan merupakan Tanda Terima LHKPN. Tanda terima LHKPN akan kami kirimkan setelah Dokumen Kelengkapan telah kami terima dan LHKPN telah diverifikasi oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Setelah mengirimkan LHKPN, Lampiran 4. Surat Kuasa dapat segera dikirimkan dengan batas waktu 2 minggu (jika Surat Kuasa sudah pernah disampaikan tidak perlu dikirim kembali).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kami kembali melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id) atau call center **198**.

Atas kerjasama yang diberikan, Kami ucapkan terima kasih

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

---

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2025/Periodik - 2024)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOCH FAREZ DWI SENTANU  
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
3. NHK : 699372

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m<sup>2</sup>/30 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SKUTIK Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.000.000

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 100.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 324.100.000

**III. HUTANG** Rp. 200.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 124.100.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.